



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAYONG SURYO LAKSONO/RMCF SURYO LAKSONO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 408877

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 21.699.655.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/118 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.485.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 680 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 4495 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.505.825.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 446 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.508.630.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/550 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 2.520.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER HARDTOP FJ 40 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.4 G Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 785.000.000
4. MOBIL, MINICOOPER S Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 785.000.000



5. MOBIL, HONDA HRV-RS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 950.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.339.454.444

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 26.509.109.444

III. HUTANG Rp. 4.080.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 22.429.109.444

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.